



RENJA RENCANA KERJA TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

SEKRETARIAT DPRD

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT senantiasa kami panjatkan, karena berkat rahmat dan HidayahNya sehingga Rencana Kerja Instansi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Penyajian Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 ini pada prinsipnya merupakan rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Pada Tahun 2023 untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa informasi yang disajikan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan Rencana Kerja 2023 ini selanjutnya.

Akhirnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kab. Sidrap Tahun 2023 kami persembahkan dengan segala Kerendahan hati. Semoga berguna dan mencapai tujuannya. Amin...

Pangkajene Sidenreng, 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DPRD KAB. SIDRAP



A. MUH. FAISAL, SH, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP : 19650809 199403 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	2
I.3 Maksud dan Tujuan RENJA	3
I.4 Sistematika Penulisan RENJA	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis SKPD	7
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	16
II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	20
II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
- II.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
III.1 Telaah Terhadap Keijakan Nasional	34
III. 2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja SKPD	34
III.3 Program dan Kegiatan	35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	36
BAB V PENUTUP	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta sesuai Peraturan Bupati Nomor Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Tahun 2023 . Perumusan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 mengakomodir program-program yang ada di OPD, dengan demikian Sekretariat DPRD sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2023 diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja OPD.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang memuat rencana Program dan Kegiatan untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang ini akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2023 yang selanjutnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang –undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 36)

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan atau dasar dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewajibannya secara terarah, efisien, dan efektif, selain itu dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kegiatan kesekretariatan dan pelayanan kedewanan, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2023 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD tahun 2023 ;
2. Sebagai rencana dalam memfasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas dan wewenang kedewanan;

3. Sebagai sarana mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2023 ;
4. Merupakan rencana dan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD .

Adapun tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Sekretariat DPRD di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mulai dari awal perencanaan;
2. Mewujudkan pelayanan tugas dan wewenang kedewanan yang aspiratif, transparan, akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah dalam bentuk rancangan rencana kerja;
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang kedewanan;
5. Dasar untuk melaksanakan program-program dan kegiatan kedewanan.
6. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kab. Sidrap Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan hukum Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD

dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

- 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA Sekretariat DPRD Tahun 2023
- 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Sekretariat DPRD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021 dan Capaian RENSTRA Sekretariat DPRD 2018-2023 Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD Tahun 2021 dan perkiraan pencapaian tahun 2022 , mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Sekretariat DPRD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelaksanaan Sekretariat DPRD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Berisikan uraian mengenai : perkembangan tingkat kinerja pelayanan Inspektorat, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian Visi, dan Misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai : membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan, penjelasan temuan dari hasil perbandingan.

- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program atau kegiatan yang diusulkan para stakeholders yang terkait langsung dengan pelayanan.

Bab III Tujuan, Sasaran

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan Tugas pokok, dan Fungsi Sekretariat DPRD

- 3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Sekretariat DPRD Merupakan suatu rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok, dan fungsi Sekretariat DPRD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA Sekretariat DPRD.

- 3.3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan Pendanaannya

Bab V Penutup

Berisikan Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SEKRETARIAT DPRD KAB. SIDRAP TAHUN 2021

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kab. Sidrap tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai tolak ukur capaian kinerja dan evaluasi. Evaluasi terhadap Rencana Kerja meliputi 3 (tiga) hal yaitu, kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan serta monev hasil rencana program dan kegiatan. Dalam penyusunan RENJA 2023 tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran di tahun 2021 . Evaluasi RENJA 2021 terhadap program/kegiatan, sasaran, indikator kinerja, realisasi capaian kinerja terhadap RENSTRA, target kinerja, anggaran RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, realisasi kinerja dan realisasi anggaran pada tahun anggaran 2021 , yaitu :

II.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Realisasi program/kegiatan di tahun 2021 yang tidak mencapai target kinerja sesuai yang direncanakan adalah :

- Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
- Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja DPRD

Kegiatannya tidak terlaksana, karena padatnya Jadwal dan kegiatan Anggota DPRD dan dianggarkan kembali pada tahun 2022

II.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi Target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari 2 Program yang dilaksanakan, sebagian besar programnya terlaksana. Yaitu :

- a. Program Dukungan Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD terlaksana 96,59 %
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terlaksana 95,73 %

II.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan di tahun 2021 tidak ada yang melebihi target kinerja. Semua program/kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan

II.1.4 Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program kegiatan.

Adapun Penyebab tidak tercapainya target kinerja di akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
 - Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja DPRD

Kegiatannya tidak terlaksana, karena padatnya Jadwal dan kegiatan Anggota DPRD dan dianggarkan kembali pada tahun 2022

II.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Dampak yang timbul terhadap capaian program yang terdapat dalam Renstra Perangkat Daerah adalah :

1. Meningkatnya Keefektifan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
2. Meningkatnya ketepatan pelayanan dalam memfasilitasi Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD
3. Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD

II.1.6 Kebijakan tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.

Dalam rangka efektifitas realisasi anggaran dalam pencapaian target kinerja sesuai yang telah direncanakan sebelumnya, maka kebijakan yang diambil untuk meminimalisasi penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan persentase Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan rapat-rapat
2. Meningkatkan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
3. Mengatur jadwal pelaksanaan rapat-rapat yang lebih efektif

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kab. Sidrap Tahun 2021 dijelaskan pada Tabel T-C29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021
Kabupaten Sidenreng Rappang**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan kegiatan (renja perangkat daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		33.272.509	96,60	96,60	100	200	
4	02	01	Cakupan Peraturan Daerah yang difasilitasi pembahasannya	500		100	100	67,97	100	200	40
4	02	01	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan	100		13	20	84,61	20	40	40
4	01	05	Jumlah Pembahasan Rancangan Perda	100		20	20	35	20	40	40
4	01	06	Jumlah Dokumen naskah akademik yang diterbitkan	20		4	4	100	4	8	40
4	02	02	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terlaksana	500		100	100	100	100	200	40
4	02	01	Jumlah rapat Pembahasan KUA dan PPAS	5		1	1	100	1	2	40
4	02	02	Jumlah rapat Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	5		1	1	100	1	2	40
4	02	03	Jumlah rapat Pembahasan APBD	5		1	1	100	1	2	40
4	02	04	Jumlah rapat Pembahasan Perubahan APBD	5		1	1	100	1	2	40

4	02	02	2	03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terlaksana	100	600.000			100	18,41	100	18,41	100	100
4	02	02	2	03	01	Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah rapat Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	15	60.000		3	-	3	-	3	40
4	02	02	2	03	02	Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	Jumlah Rapat Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	15	60.000		3	-	3	-	3	40
4	02	02	2	03	03	Pengawasan urusan Pemerintahan Kesejahteraan rakyat	Jumlah Rapat Pengawasan urusan Pemerintahan Kesejahteraan rakyat	15	60.000		3	-	3	-	3	40
4	02	02	2	03	04	Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	Jumlah Rapat Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	15	60.000		3	-	3	-	3	40
4	02	02	2	03	05	Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Sumber daya alam	Jumlah Rapat Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Sumber daya alam	15	60.000		3	-	3	-	3	40
4	02	02	2	03	06	Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Rapat Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	5	30.000		1	-	1	-	1	40
4	02	02	2	03	07	Pengawasan Penggunaan anggaran	Jumlah Rapat Pengawasan Penggunaan anggaran	5	90.000		1	-	1	-	1	40
4	02	02	2	03	08	Pengawasan Laporan Keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rapat Pengawasan Laporan Keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah	5	180.000		1	100	1	100	1	40
4	02	02	2	04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang terlaksana	500	3.234.000			100	68,65	100	68,65	100	40
4	02	02	2	04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	175	2.190.000		35	100	35	100	35	40

4	02	02	2	04	03	Dewan	Dewan yang bertugas	60	288.000				12	100	12	100	12	100	12	24	40
4	02	02	2	04	05	Penyediaan Tenaga ahli Fraksi	Penyediaan Tenaga ahli Fraksi yang disediakan	35	378.000				7	100	7	100	7	100	7	14	40
4	02	02	2	04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen Program Kerja DPRD yang dihasilkan	5	78.000				1	-	1	-	1	-	1	2	40
4	02	02	2	05		Penyerapan dan pengumpulan aspirasi masyarakat	Persentase Penyerapan dan pengumpulan aspirasi masyarakat	500	8.614.500				100	62.07	100	62.07	100	62.07	100	162.07	
4	02	02	2	05	01	Kunjungan Kerja dalam daerah	Jumlah Kunjungan Kerja dalam daerah yang difasilitasi	60	499.500				12	100	12	100	12	100	12	24	40
4	02	02	2	05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Reses	15	8.100.000				3	100	3	100	3	100	3	6	40
4	02	02	2	08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi tugas DPRD yang terlaksana	500	18.682.109				100	100	100	100	100	100	100	200	
4	02	02	2	08	01	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD yang terlaksana	300	18.682.109				60	100	60	100	100	100	60	120	40
4	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	500	76.241.168												
4	02	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500	125.100				100	100	100	100	100	100	100	200	
4	02	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	19.500				1	100	1	100	1	100	1	2	40
4	02	01	2	01	02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	5	21.000				1	100	1	100	1	100	1	2	40
4	02	01	2	01	03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	19.500				1	100	1	100	1	100	1	2	40

Dinas dan Atribut DPRD		disediakan		210	83,33	210	210	420	40
XXX Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melakukan Check Up	175	513.000			35	100	35	40
XXX Layanan Administrasi DPRD	Layanan Administrasi DPRD	500	3.036.000			100	100	100	40
XXX Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD	60	300.000			12	100	12	40
XXX Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	60	2.736.000			12	100	12	40

II.2. Analisa Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Sidrap

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang menguji indikator yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat. Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Sedangkan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2008, sebagai berikut :

- a. Penyelenggara administrasi Kesekretariatan DPRD
- b. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. Dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara umum tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai fasilitator kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD telah berfungsi dengan baik, yang terlihat dari hasil capaian kinerja penyelenggaraan seluruh kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja;

- Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang disahkan menjadi Peraturan Daerah

Berdasarkan Kajian terhadap capaian kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Sidrap berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dapat dilihat pada Lampiran Tabel T-C.30.

Tabel T-C.30

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

SKPD : SEKRETARIAT DPRD KAB. SIDRAP

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13
1	Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang disahkan menjadi Peraturan Daerah oleh DPRD			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	95,00	75	86,42	100 %	100 %	

II. 3 Isu-isu Strategis Penyelenggara Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kab. Sidrap

Dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi DPRD, diperlukan peningkatan kualitas penyelenggara pelayanan pada Sekretariat DPRD Kab. Sidrap meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem pelayanan dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

- 1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional dan struktural serta bimbingan teknis/kursus-kursus singkat.
- 2) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
- 3) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.
- 4) Peningkatan kualitas perencanaan dalam penyusunan / perancangan peraturan daerah, peraturan DPRD dan Keputusan DPRD.

Dalam proses penyusunan rencana pembangunan perlu dilengkapi dengan analisis dan indentifikasi isu-isu strategis guna meningkatkan prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis yang diuraikan dalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang ini merupakan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang pada dasarnya terdiri dari potensi, peluang dan tantangan sebagai suatu kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang akan disusun karena dampaknya yang signifikan bagi Sekretariat DPRD dimasa yang akan datang. Isu isu strategis yang dapat diidentifikasi dalam Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal dapat dirasakan belum dapat dilakukan secara optimal mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang professional dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.

Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat ditentukan isi-isu strategis yaitu sebagai berikut :

1. Adanya usulan raperda eksekutif pada saat tahun berjalan yang belum memenuhi jumlah target raperda yang telah ditetapkan, sehingga perlu adanya koordinasi yang sinergis antara legislatif dan eksekutif
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional dan struktural serta bimbingan teknis/kursus-kursus singkat

II.3.2. Dampak Terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Telah dilaksanakan Penyusunan rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kab. Sidrap yang merupakan penjabaran yang lebih detail terhadap perencanaan Pembangunan Daerah sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra maupun Renja sejalan dengan Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah (RPJM) Kabupaten tahun 2023–2018, dengan demikian sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dapat mencerminkan misi Pemerintahan Kabupaten yaitu Terwujudnya Pelayanan Prima Dalam Mendukung Kelancaran Tugas Dan Fungsi DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.

II.3.2. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah

Beberapa hal yang menjadi Tantangan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam memberikan pelayanan atau memfasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah :

1. Tuntutan Pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD;
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Profesional, Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum lengkap dan memadai;
3. Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD dan Kegiatan-kegiatan DPRD yang bersifat Tentatif
4. Perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh pada Kode Etik dan tata tertib DPRD;
5. Kebutuhan peningkatan peran dan koordinasi Internal dan Eksternal antar Perangkat Daerah ;
6. Peningkatan supremasi hukum.

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam memberikan pelayanan atau memfasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah :

1. Diterbitkannya Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 merupakan bentuk penguatan terhadap posisi DPRD sebagai Bagian dari Penyelenggara Pemerintahan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD dan menciptakan kondisi sosial Negara yang baik dan seimbang.
2. Kerjasama dengan Perangkat Daerah, Instansi terkait, Anggota Forkopimda untuk dialog atau dengar pendapat dalam hal penerimaan Aspirasi dari masyarakat;
3. Komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Jadwal Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) yang disusun oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah;
4. Terbukanya kesempatan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM melalui Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
5. Peningkatan sarana dan prasarana yang menjadi penunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
6. Perkembangan Teknologi

II.3.2. Isu-isu penting dan catatan strategis dalam perumusan program dan kegiatan

Isu-isu penting dan catatan strategis yang terkait dengan dinamika lingkungan serta dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga sistem pendukung DPRD, maka menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam satu tahun kedepan adalah :

1. Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan
 Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD diperlukan sistem administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan dan mengikuti perkembangan teknologi, dengan mengikuti perkembangan teknologi diharapkan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih efisien dan efektif.
2. Pemantapan Peran Sekretariat DPRD sebagai Fasilitator dan Mediator Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
 Peran Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD perlu lebih ditingkatkan, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang harus selalu mengambil sikap proaktif dalam berkomunikasi dan

menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang potensial bersinergi dengan lembaga legislatif guna mewujudkan sinersitas kelembagaan di daerah.

3. Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Lembaga yang bersih, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka perencanaan dan pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja perlu disusun secara transparan dan berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPRD serta dilaksanakan secara transparan dengan demikian, perencanaan dan pengelolaan keuangan akan lebih berorientasi menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara optimal.

II.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD

Berdasarkan rancangan awal RKPD tahun 2023 , Sekretariat DPRD melakukan analisis terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada renja tahun 2023 . Analisis yang dilakukan merupakan estimasi volume kegiatan dan dana yang dibutuhkan. Analisis kebutuhan diperlukan sebagai langkah antisipasi agar program dan kegiatan yang direncanakan dapat terakomodir seluruhnya dalam dokumen RKPD baik jumlah program/ kegiatan, volume, maupun dana yang dibutuhkan. Review terhadap Rancangan RKPD tahun 2023 ditunjukkan oleh Tabel 3. Setelah membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, dapat disimpulkan bahwa seluruh program/ kegiatan yang direncanakan pada renja tahun 2023 beserta besarannya telah terakomodir dalam rancangan awal RKPD.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat.

- 1) Rancangan kerangka ekonomi Daerah
- 2) Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 3) Rencana Kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS Rencana kerja Sekretariat DPRD Kab. Sidrap berdasarkan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk lebih jelasnya mengenai Review rancangan awal RKPD tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran tabel T-C.31.

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Sidenreng Rappang

Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisa Kebutuhan 2024				
NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
	SEKRETARIAT DPRD				38.591.839.000	SEKRETARIAT DPRD				39.840.502.151
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah yang disahkan menjadi Peraturan Daerah oleh DPRD	100%	15.695.549.200	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah yang disahkan menjadi Peraturan Daerah oleh DPRD	100%	16.917.081.000
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pangkajene	Cakupan Peraturan Daerah yang difasilitasi Pembahasannya	100%	647.825.000	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pangkajene	Cakupan Peraturan Daerah yang difasilitasi Pembahasannya	100%	647.825.000
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Pangkajene	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan	20 Ranperda	78.036.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Pangkajene	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan	20 Ranperda	78.036.000

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pangkajene	Jumlah Pembahasan Rancangan Perda	106.965.000	95 Kali	106.965.000	Jumlah Pembahasan Rancangan Perda	95 Kali	106.965.000
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Pangkajene	Jumlah Dokumen naskah akademik yang diterbitkan	462.824.000	4 Dokumen	462.824.000	Jumlah Dokumen naskah akademik yang diterbitkan	4 Dokumen	462.824.000
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Pangkajene	Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang diterbitkan	1 Dokumen	1 Dokumen		Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang diterbitkan	1 Dokumen	
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pangkajene	Persentase Pembahasan Kebijakan anggaran yang terlaksana	197.500.000	100%	197.500.000	Persentase Pembahasan Kebijakan anggaran yang terlaksana	100%	197.500.000
Pembahasan KUA dan PPAS	Pangkajene	Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS	19.500.000	1 Kali	19.500.000	Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS	1 Kali	19.500.000
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pangkajene	Jumlah Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	19.500.000	1 Kali	19.500.000	Jumlah Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Kali	19.500.000
Pembahasan APBD	Pangkajene	Jumlah Pembahasan APBD	46.500.000	1 Kali	46.500.000	Jumlah Pembahasan APBD	1 Kali	46.500.000
Pembahasan APBD Perubahan	Pangkajene	Jumlah Pembahasan APBD Perubahan	47.500.000	1 Kali	47.500.000	Jumlah Pembahasan APBD Perubahan	1 Kali	47.500.000
Pembahasan Laporan Semester	Pangkajene	Jumlah pembahasan Laporan Semester yang terlaksana		1 Kali		Jumlah pembahasan Laporan Semester yang terlaksana	1 Kali	

Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pangkajene	Jumlah Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Kali	64.500.000	1 Kali	64.500.000
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pangkajene	Persentase pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang terlaksana	100%	147.737.200	100%	142.500.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Pangkajene	Jumlah Rapat Pengawasan Ususan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum yang dihasilkan	3 Kali	16.709.000	3 Kali	16.709.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pangkajene	Jumlah Rapat Pengawasan Ususan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yang dihasilkan	3 Kali	10.875.000	3 Kali	10.875.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pangkajene	Jumlah Rapat Pengawasan Ususan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	3 Kali	17.562.200	3 Kali	12.325.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pangkajene	Jumlah Rapat Pengawasan Ususan Pemerintahan Bidang Perekonomian yang dihasilkan	3 Kali	10.875.000	3 Kali	10.875.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Pangkajene	Jumlah Rapat Pengawasan Ususan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam yang dihasilkan	3 Kali	10.800.000	3 Kali	10.800.000

Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pangkajene	Jumlah Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang dihasilkan	1 Kali	10.000.000	Pangkajene	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	10.000.000	1 Kali	Pangkajene	Jumlah Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang dihasilkan	1 Kali	10.000.000
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pangkajene	Jumlah Pengawasan Penggunaan Anggaran yang dihasilkan	1 Kali	17.500.000	Pangkajene	Pengawasan Penggunaan Anggaran	17.500.000	1 Kali	Pangkajene	Jumlah Pengawasan Penggunaan Anggaran yang dihasilkan	1 Kali	17.500.000
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pangkajene	Jumlah Pembahasan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Kali	53.416.000	Pangkajene	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	53.416.000	1 Kali	Pangkajene	Jumlah Pembahasan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Kali	53.416.000
Peningkatan Kapasitas DPRD	Pangkajene	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	5.101.125.000	Pangkajene	Peningkatan Kapasitas DPRD	5.101.125.000	100%	Pangkajene	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	5.597.000.000
Orientasi DPRD	Pangkajene				Pangkajene	Orientasi DPRD			Pangkajene			
Bimbingan Teknis DPRD	Pangkajene	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	35 Orang	401.329.000	Pangkajene	Bimbingan Teknis DPRD	401.329.000	35 Orang	Pangkajene	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	35 Orang	861.329.000
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Pangkajene	Jumlah publikasi dan Dokumentasi Dewan yang terfaksana	12 Kali	4.536.301.000	Pangkajene	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4.536.301.000	12 Kali	Pangkajene	Jumlah publikasi dan Dokumentasi Dewan yang terfaksana	12 Kali	4.572.176.000
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Pangkajene	Jumlah Tim Ahli yang disediakan	2 Orang		Pangkajene	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		2 Orang	Pangkajene	Jumlah Tim Ahli yang disediakan	2 Orang	
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Pangkajene	Jumlah Penyediaan tenaga ahli Fraksi DPRD yang disediakan	7 Orang	126.000.000	Pangkajene	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	126.000.000	7 Orang	Pangkajene	Jumlah Penyediaan tenaga ahli Fraksi DPRD yang disediakan	7 Orang	126.000.000

Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pangkajene	Jumlah Dokumen Program kerja DPRD yang dihasilkan	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pangkajene	Jumlah Dokumen Program kerja DPRD yang dihasilkan
Penyusunan Program Kerja DPRD	Pangkajene	37.495.000	1 Dokumen	Penyusunan Program Kerja DPRD	Pangkajene
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Pangkajene	2.945.000.000	100%	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Pangkajene
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Pangkajene	311.894.000	12 Kali	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Pangkajene
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Pangkajene	1 Dokumen	1 Dokumen	Pangkajene	Pangkajene
Pelaksanaan Reses	Pangkajene	3 Kali	2.633.106.000	Pelaksanaan Reses	Pangkajene
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Pangkajene	2.500.000	2.500.000	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Pangkajene
Penyusunan Kode Etik DPRD	Pangkajene	1 Dokumen	2.500.000	Penyusunan Kode Etik DPRD	Pangkajene
Pengawasan Kode Etik DPRD	Pangkajene	2 Kali		Pengawasan Kode Etik DPRD	Pangkajene
Pembahasan Kerja Sama Daerah		-		Pembahasan Kerja Sama Daerah	
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah				Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	

Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Pangkajene	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Tugas DPRD yang terlaksana	100%	6.653.862.000	Fasilitasi Tugas DPRD	Pangkajene	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Tugas DPRD yang terlaksana	100%	7.384.756.000
Kordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Pangkajene	Jumlah Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD yang terlaksana	60 Kali	6.653.862.000	Kordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Pangkajene	Jumlah Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD yang terlaksana	60 Kali	7.384.756.000
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Pangkajene	Jumlah Rapat Pelaksanaan tugas Badan Musyawarah yang difasilitasi	15 Kali		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Pangkajene	Jumlah Rapat Pelaksanaan tugas Badan Musyawarah yang difasilitasi	15 Kali	20.000.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Pangkajene				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Pangkajene			
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Pangkajene				Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Pangkajene			
XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pangkajene			22.896.289.800	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pangkajene			22.923.421.121
XXX Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pangkajene		100%	30.209.000	XXX Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pangkajene		100%	30.209.000
XXX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkajene	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.000.000	XXX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkajene	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.000.000

XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Pangkajene	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.534.000	XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Pangkajene	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.534.000
XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Pangkajene	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.500.000	XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Pangkajene	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.500.000
XXX Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Pangkajene	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.600.000	XXX Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Pangkajene	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.600.000
XXX Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Pangkajene	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.835.000	XXX Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Pangkajene	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.835.000
XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pangkajene	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	5.740.000	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pangkajene	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	5.740.000
XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pangkajene		100%	2.620.248.900	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pangkajene		100%	2.618.248.900
XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pangkajene	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.605.778.900	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pangkajene	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.603.778.900
XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pangkajene	Waktu pelaksanaan penatausahaan dan pengujian keuangan SKPD	12 Bulan	8.000.000	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pangkajene	Waktu pelaksanaan penatausahaan dan pengujian keuangan SKPD	12 Bulan	8.000.000
XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pangkajene	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pangkajene	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000

XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Pangkajene	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran/triwulan SKPD	14 Laporan	4.470.000	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Pangkajene	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran/triwulan SKPD	14 Laporan	4.470.000
XXX Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pangkajene		100%		XXX Administrasi Barang Milik Daerah	Pangkajene		100%	
XXX Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pangkajene	Jumlah kendaraan dinas yang diarsuransikan	10 Unit		XXX Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pangkajene	Jumlah kendaraan dinas yang diarsuransikan	10 Unit	
XXX Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Pangkajene		100%	137.764.000	XXX Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Pangkajene		100%	155.000.000
XXX Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pangkajene	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			XXX Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pangkajene	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Kali	
XXX Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pangkajene	Jumlah Aparatur Sekretariat DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis	30 Orang	137.764.000	XXX Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pangkajene	Jumlah Aparatur Sekretariat DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis	60 Orang	155.000.000
XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pangkajene		100%	408.066.600	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pangkajene		100%	408.066.600
XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pangkajene	Jumlah dan Jenis alat-alat listrik/penerangan bangunan kantor	500 Buah	60.051.600	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pangkajene	Jumlah dan Jenis alat-alat listrik/penerangan bangunan kantor	500 Buah	60.051.600
XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pangkajene	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	75 unit		XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pangkajene	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan		

XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pangkajene	Jumlah peralatan Rumah Tangga yang disediakan	15 unit		XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pangkajene	Jumlah peralatan Rumah Tangga yang disediakan	15 unit	
XXX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pangkajene	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	150000 Lembar	68.333.000	XXX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pangkajene	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	150000 Lembar	68.333.000
XXX Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pangkajene	Jumlah Bahan bacaan Peraturan Perundang-undangan	300 buku		XXX Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pangkajene	Jumlah Bahan bacaan Peraturan Perundang-undangan	300 buku	
XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Pangkajene	Jumlah Tamu yang berkunjung	1200 Orang	279.682.000	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Pangkajene	Jumlah Tamu yang berkunjung	1200 Orang	279.682.000
XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene		100%	388.739.900	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene		100%	250.100.000
XXX Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pangkajene				XXX Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pangkajene			
XXX Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pangkajene	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan			XXX Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pangkajene	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan		
XXX Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pangkajene	Jumlah Kantor dan Rumah Jabatan yang dipelihara			XXX Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pangkajene	Jumlah Kantor dan Rumah Jabatan yang dipelihara		
XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pangkajene	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan	35 Unit	388.739.900	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pangkajene	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan	7 Unit	250.100.000
XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pangkajene				XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pangkajene			
XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene		100%	1.063.499.000	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene		100%	1.484.461.000

XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pangkajene	Jumlah Dokumen bermaterai	1650 Lembar	20.000.000	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pangkajene	Jumlah Dokumen bermaterai	1650 Lembar	20.000.000
XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pangkajene	Frekuensi Pembayaran Telepon, air dan Listrik	12 Bulan	287.952.000	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pangkajene	Frekuensi Pembayaran Telepon, air dan Listrik	12 Bulan	305.952.000
XXX Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pangkajene	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	74.510.000	XXX Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pangkajene	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	74.510.000
XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pangkajene	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	681.037.400	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pangkajene	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	1.083.999.000
XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene		100%	785.380.000	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene		100%	546.000.000
XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pangkajene	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	7 unit	20.660.000	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pangkajene	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	7 unit	20.660.000
XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pangkajene	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	28 Unit	308.600.000	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pangkajene	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	28 Unit	250.786.000
XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pangkajene	Jumlah Kantor dan Rumah Jabatan yang dipelihara	4 unit	456.120.000	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pangkajene	Jumlah Kantor dan Rumah Jabatan yang dipelihara	4 unit	274.560.000
XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pangkajene	Jumlah sarana dan Prasarana gedung kantor dan rumah jabatan yang dipelihara	116 Unit		XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pangkajene	Jumlah sarana dan Prasarana gedung kantor dan rumah jabatan yang dipelihara	116 Unit	

XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pangkajene	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehabilitasi			XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pangkajene	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehabilitasi		
XXX Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pangkajene		100%	16.280.382.000	XXX Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pangkajene		100%	16.394.882.000
XXX Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Pangkajene	Waktu Penyediaan administrasi keuangan DPRD	12 Bulan	15.650.882.000	XXX Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Pangkajene	Waktu Penyediaan administrasi keuangan DPRD	12 Bulan	15.642.882.000
XXX Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Pangkajene	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	210 Pasang	437.000.000	XXX Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Pangkajene	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	210 Pasang	559.500.000
XXX Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Pangkajene	Jumlah Anggota DPRD yang melakukan Check Up	35 Orang	192.500.000	XXX Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Pangkajene	Jumlah Anggota DPRD yang melakukan Check Up	35 Orang	192.500.000
XXX Layanan Administrasi DPRD	Pangkajene		100%	1.182.000.000	XXX Layanan Administrasi DPRD	Pangkajene		100%	1.082.000.000
XXX Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Pangkajene	Jumlah koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD	12 Kali	150.000.000	XXX Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Pangkajene	Jumlah koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD	12 Kali	150.000.000
XXX Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Pangkajene	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	12 Bulan	1.032.000.000	XXX Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Pangkajene	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	12 Bulan	912.000.000

II.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak menerima langsung usulan program dan kegiatan masyarakat karena Tugas pokok dan Fungsinya tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, hanya saja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang memfasilitasi usulan kegiatan yang diajukan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik secara langsung maupun usulan masyarakat dalam kegiatan Reses DPRD dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Aspirasi dari masyarakat ini kemudian dibahas dalam rapat-rapat dan hasilnya disampaikan kepada Bupati Sidenreng Rappang.

Tabel T-C.32
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama SKPD : SEKRETARIAT DPRD KAB. SIDRAP

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	NIHIL		NIHIL		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan Sumber Daya yang dimiliki serta kendala – kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan Misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan Visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standart penyelenggaraan Gow Governance dan Akuntabilitas Publik. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara Eksekutif dan Legislatif ;
- 2) Meningkatkan pelayanan prima kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang ;
- 3) Melakukan kerja sama dengan Stekholder, dan media masa agar terbangun Opini Publik yang sehat dan bermartabat ;
- 4) Memfasilitasi dan mendorong kelancaraan dan pelaksanaan rapat – rapat dan sidang – sidang ; dan
- 5) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Staf Sekretariat Dewan.

III. 2. Tujuan dan Sasaran Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidrap

- 1) Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut : “ Meningkatkan Kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi fungsinya sebagai lembaga legislatif yang bermartabat, aspiratif dan responsif ”
- 2) Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang
Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya ketepatan pelayanan dalam memfasilitasi Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD
2. Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD

III.3. Program dan kegiatan

III.3.1 Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan untuk menjalankan misi yang dilakukan oleh suatu organisasi sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang; maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

III.3.2. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan, berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Peningkatan Kapasitas DPRD
 - Penyerapan dan Penghimpunan aspirasi masyarakat
 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - Fasilitasi Tugas DPRD
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan
 - Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan
 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - Layanan administrasi DPRD

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sekretariat DPRD dalam mewujudkan Sasaran memiliki 2 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 Kegiatan dengan 27 Sub Kegiatan dan Program Dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kota terdiri dari 7 Kegiatan dengan 24 Sub Kegiatan Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023

SKPD : SEKRETARIAT DPRD KAB. SIDRAP

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
	SEKRETARIAT DPRD				38.591.839.000				39.840.502.151
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah yang disahkan menjadi Peraturan Daerah oleh DPRD	Pangkajene	100%	15.695.549.200	APBD		100%	16.917.081.000
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan Peraturan Daerah yang difasilitasi Pembahasannya	Pangkajene	100%	647.825.000	APBD		100%	647.825.000
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Pangkajene	1 Dokumen	78.036.000	APBD		20 Ranperda	78.036.000

	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan Rancangan Perda	Pangkajene	15 Dokumen	106.965.000	APBD		95 Kali	106.965.000
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Pangkajene	4 Dokumen	462.824.000	APBD		4 Dokumen	462.824.000
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang diterbitkan	Pangkajene	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan anggaran yang terlaksana	Pangkajene	100%	197.500.000	APBD		100%	197.500.000
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Pangkajene	1 Dokumen	19.500.000	APBD		1 Dokumen	19.500.000
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pangkajene	1 Dokumen	19.500.000	APBD		1 Dokumen	19.500.000
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Pangkajene	1 Dokumen	46.500.000	APBD		1 Dokumen	46.500.000
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Pangkajene	1 Dokumen	47.500.000	APBD		1 Dokumen	47.500.000
	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil pembahasan Laporan Semester	Pangkajene	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	

	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pangkajene	1 Dokumen	64.500.000	APBD	1 Kali	64.500.000
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang terlaksana	Pangkajene	100%	147.737.200	APBD	100%	142.500.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Pangkajene	1 Laporan	16.709.000	APBD	1 Laporan	16.709.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pangkajene	1 Laporan	10.875.000	APBD	1 Laporan	10.875.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pangkajene	1 Laporan	17.562.200	APBD	1 Laporan	12.325.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pangkajene	3 Laporan	10.875.000	APBD	3 Laporan	10.875.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Pangkajene	3 Laporan	10.800.000	APBD	3 Laporan	10.800.000

	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah laporan hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pangkajene	1 Laporan	10.000.000	APBD		1 Laporan	10.000.000
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pangkajene	1 Laporan	17.500.000	APBD		1 Laporan	17.500.000
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Laporan hasil Pembahasan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pangkajene	1 Laporan	53.416.000	APBD		1 Laporan	53.416.000
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Pangkajene	100%	5.101.125.000	APBD		100%	5.597.000.000
	Orientasi DPRD		Pangkajene			APBD			
	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Hasil pendalaman tugas DPRD	Pangkajene	6 Dokumen	401.329.000	APBD		6 Dokumen	861.329.000
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan produk hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Pangkajene	7 Dokumen	4.536.301.000	APBD		7 Dokumen	4.572.176.000
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Tim Ahli yang disediakan	Pangkajene	2 Orang		APBD		2 Orang	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli Fraksi DPRD	Pangkajene	7 Orang	126.000.000	APBD		7 Orang	126.000.000
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Pangkajene			APBD			

	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Program kerja DPRD	Pangkajene	1 Dokumen	37.495.000	APBD		1 Dokumen	37.495.000
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Pangkajene	100%	2.945.000.000	APBD		100%	2.945.000.000
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan kunjungan Kerja dalam daerah	Pangkajene	12 laporan	311.894.000	APBD		12 laporan	311.894.000
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Pangkajene	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	
	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Reses	Pangkajene	105 Dokumen	2.633.106.000	APBD		105 Dokumen	2.633.106.000
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Pangkajene		2.500.000	APBD			2.500.000
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Pangkajene	1 Laporan	2.500.000	APBD		1 Laporan	2.500.000
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Rapat Pengawasan Kode Etik DPRD yang dilaksanakan	Pangkajene	2 Kali		APBD		2 Kali	
	Pembahasan Kerja Sama Daerah		Pangkajene		-	APBD			-
	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah		Pangkajene			APBD			
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi		Pangkajene			APBD			

Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang terlaksana	Pangkajene	100%	6.653.862.000	APBD	100%	7.384.756.000
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD	Pangkajene	29 Dokumen	6.653.862.000	APBD	32 Dokumen	7.384.756.000
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Pangkajene			APBD		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Rapat Pelaksanaan tugas Badan Musyawarah yang difasilitasi	Pangkajene	15 Kali		APBD	15 Kali	20.000.000
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Pangkajene			APBD		
XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Pangkajene	100 %	22.896.289.800	APBD		22.923.421.121
XXX Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah terlaksana tepat waktu	Pangkajene	100%	30.209.000	APBD	100%	30.209.000
XXX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkajene	2 Dokumen	6.000.000	APBD	2 Dokumen	6.000.000
XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS/KPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Dokumen RKA-SKPD	Pangkajene	1 Dokumen	6.534.000	APBD	1 Dokumen	6.534.000

	XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pangkajene	1 Dokumen	6.500.000	APBD	1 Dokumen	6.500.000
	XXX Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Pangkajene	1 Dokumen	2.600.000	APBD	1 Dokumen	2.600.000
	XXX Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Pangkajene	1 Dokumen	2.835.000	APBD	1 Dokumen	2.835.000
	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pangkajene	1 Dokumen	5.740.000	APBD	1 Dokumen	5.740.000
	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pengelolaan administrasi keuangan maksimal dan tepat waktu	Pangkajene	100%	2.620.248.900	APBD	100%	2.618.248.900
	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pangkajene	30 Orang	2.605.778.900	APBD	30 Orang	2.603.778.900
	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian keuangan SKPD	Pangkajene	12 Dokumen	8.000.000	APBD	12 Dokumen	8.000.000
	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Pangkajene	1 Laporan	2.000.000	APBD	1 Laporan	2.000.000
	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran/triwulan SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Pangkajene	14 Laporan	4.470.000	APBD	14 Laporan	4.470.000

	XXX Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Pangkajene	100%		APBD		100%	
	XXX Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang diasuransikan	Pangkajene	10 Unit		APBD		10 Unit	
	XXX Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan administrasi kepegawaian terlaksana tepat waktu	Pangkajene	100%	137.764.000	APBD		100%	155.000.000
	XXX Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Pangkajene			APBD		3 Kali	
	XXX Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	Pangkajene	30 Orang	137.764.000	APBD		30 Orang	155.000.000
	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi Umum Perangkat Daerah	Pangkajene	100%	408.066.600	APBD		100%	408.066.600
	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Pangkajene	12 Paket	60.051.600	APBD		12 Paket	60.051.600
	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Pangkajene	75 unit		APBD		75 unit	
	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Pangkajene	15 unit		APBD		15 unit	
	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Pangkajene	12 Paket	68.333.000	APBD		12 Paket	68.333.000

	XXX Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan Peraturan Perundang-undangan	Pangkajene	300 buku		APBD		300 buku	
	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Pangkajene	12 Paket	279.682.000	APBD		12 Paket	279.682.000
	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah yang terpenuhi	Pangkajene	100%	388.739.900	APBD		100 %	260.100.000
	XXX Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pangkajene			APBD			
	XXX Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	Pangkajene			APBD			
	XXX Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kantor dan Rumah Jabatan yang dipelihara	Pangkajene			APBD			
	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan	Pangkajene	35 Unit	388.739.900	APBD		7 Unit	260.100.000
	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pangkajene			APBD			
	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Pangkajene	100%	1.063.499.000	APBD		100%	1.484.461.000
	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Pangkajene	12 Laporan	20.000.000	APBD		12 Laporan	20.000.000
	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pangkajene	12 Laporan	287.952.000	APBD		12 Laporan	305.952.000

XXX Penyediaan Jasa Peralatan dan Perangkakan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perangkakan Kantor	Pangkajene	12 Laporan	74.510.000	APBD	12 Laporan	74.510.000
XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pangkajene	12 Laporan	681.037.400	APBD	12 Laporan	1.083.999.000
XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene	100%	785.380.000	APBD	100%	546.000.000
XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Pangkajene	26 unit	20.660.000	APBD	26 unit	20.660.000
XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pangkajene	26 Unit	308.600.000	APBD	26 Unit	250.786.000
XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Pangkajene	4 unit	456.120.000	APBD	4 unit	274.560.000
XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana gedung kantor dan rumah jabatan yang dipelihara	Pangkajene	116 Unit		APBD	116 Unit	
XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehabilitasi	Pangkajene			APBD		
XXX Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pangkajene	100%	16.280.382.000	APBD	100%	16.394.882.000

	XXX Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak Keuangan DPRD	Pangkajene	35 Orang	15.650.882.000	APBD		35 Orang	15.942.882.000
	XXX Penyediaan Pakalan Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakalan Dinas dan atribut DPRD yang disediakan	Pangkajene	4 Paket	437.000.000	APBD		4 Paket	559.500.000
	XXX Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	Pangkajene	35 Orang	192.500.000	APBD		35 Orang	192.500.000
	XXX Layanan Administrasi DPRD	Cakupan Layanan Administrasi DPRD	Pangkajene	100%	1.182.000.000	APBD		100%	1.062.000.000
	XXX Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Pangkajene	12 Kali	150.000.000	APBD		12 Kali	150.000.000
	XXX Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	Pangkajene	36 Paket	1.032.000.000	APBD		36 Paket	912.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 merupakan dasar dan acuan pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun dalam upaya pencapaian visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penyusunan Rencana Kerja ini juga merupakan pedoman menuju kebersamaan dan gotong royong dalam melaksanakan kegiatan tahun 2023 yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang berkualitas, partisipatif, mandiri dan sejahtera.

Demikian Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023. Mudah-mudahan dapat menggambarkan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami mohon masukan untuk perbaikan penyusunan Rencana Kerja ini, seandainya Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 yang disusun ini masih jauh dari sempurna untuk itu kritik dan masukan sangat diharapkan untuk perbaikan penyusunan Renja tahun berikutnya.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan dan pelaksanaan Program Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sidenreng-Rappang, 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DPRD KAB. SIDRAP



AMU H. FAISAL, SH. M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19650809 199403 1 006